

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta maka diperoleh beberapa kesimpulan yaitu:

1. Rasio Kemandirian

Kemandirian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama tahun 2008-2010 termasuk kategori sangat baik dan menunjukkan tren positif. Hal ini membuktikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bisa membiayai kegiatan daerahnya sendiri melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan tidak bergantung pada bantuan pemerintah pusat.

2. Rasio Efektivitas

Untuk rasio efektivitas selama tahun 2008-2010 pun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih menunjukkan kinerja yang sangat baik dan juga menunjukkan grafik yang meningkat. Itu berarti Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bisa mempertahankan dan meningkatkan kinerja efektivitasnya, yang berarti juga bisa merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang ditargetkan pada saat penyusunan anggaran.

3. Rasio Keserasian

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lebih memprioritaskan alokasi dananya untuk belanja pegawai. Terbukti dengan persentase pada belanja pegawai yang jauh lebih besar dibandingkan dengan belanja pelayanan publik. Hal ini merupakan salah satu faktor yang membuat pelayanan publik di Jakarta belum optimal.

4. Rasio DSCR

Hasil perhitungan *Debt Service Cost Ratio* selama tahun 2008-2010 menunjukkan kinerja yang baik dengan nilai yang fluktuatif. Pinjaman Pemprov meningkat pada tahun 2009 dimana terlihat dari nilai DSCR yang turun dari 89,32 ke 55,72. Akan tetapi pada 2010 pinjaman yang dilakukan kembali menurun.

5. Rasio Kontribusi

Pendapatan pajak dan retribusi berkontribusi besar dalam menyumbang Pendapatan Asli Daerah, yaitu mempunyai rata-rata lebih dari 80% selama tahun 2008-2010. Itu berarti pemerintah bisa merealisasikan target pendapatan pajak dan retribusi daerah dan bisa mengharapkan pendapatan yang cukup besar dari kedua sumber tersebut.

B. Saran

1. Penulis menyarankan kepada Pemprov DKI Jakarta untuk mempertahankan kinerja keuangan yang sudah termasuk kategori sangat baik, seperti kemandirian dan efektivitas, dan juga kalau bisa peningkatannya semakin signifikan
2. Penulis menyarankan kepada Pemprov DKI Jakarta untuk tidak terus menerus memprioritaskan alokasi dananya untuk belanja pegawai. Peningkatan alokasi belanja pegawai diharapkan sejalan dengan peningkatan pelayanan publik. Akan tetapi pada kenyataannya sebagian besar warga Jakarta tidak merasa puas dengan pelayanan publik dan upaya pemda mengatasi masalah sosial seperti macet dan banjir. Diharapkan pada tahun-tahun yang akan datang alokasi belanja pegawai dan pelayanan publik bisa seiring dan seimbang sehingga pelayanan publik tidak terbengkalai dan di lain pihak kinerja aparatur negara pun maksimal.
3. Penulis menyarankan kepada pemprov DKI Jakarta untuk terus mengoptimalkan pendapatan daerahnya untuk membiayai kegiatan pemerintahan daripada harus meningkatkan pinjaman dari tahun ke tahun.